

Abdul Rasid
Dosen UIN SGD Bandung

KONSEPTUALISASI ETIKA DALAM POLITIK PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAMI

Abstract

An ethical system does not solve all the practical issues, but we can not choose and act rationally without a clear system of ethics or vague. An ethical theory does not tell someone what to do in certain situations, but he also is not silent at all; theory of ethics to tell him what should be considered to decide what he should do. Practical functions of an ethics system primarily is to direct our attention to relevant considerations, the reasons that determine the truth or fallacy of action. In this context is required institutionalization and familiarization ethics in politics. For its own pressure groups will try to interpret their interests as public interests, then it is up to the general public to judge.

خلاصة

لا يستطيع نظام أخلاقي إعطاء حل لكل مشاكل العملية، ولكننا لا يمكن الاختيار والتصرف بعقلانية دون نظام واضح. ولا تخبر نظرية أخلاقية أحدا ما يجب القيام به في حالات معينة، ولكنه أيضا ليس صامتا على الإطلاق؛ وتخبر نظريات الأخلاق لمعرفة ما ينبغي النظر فيها لتقرر ما ينبغي القيام به. والوظيفة العملية للنظام الأخلاق هي في المقام الأول إلى توجيه اهتمامنا إلى الاعتبارات ذات الصلة، والأسباب التي تحدد الحقيقة أو الزيف في العمل.

Kata Kunci:

Konseptualisasi, Etika, Politik, Perspektif,
dan Komunikasi Islam.

Pendahuluan

Sebuah masyarakat tanpa etika adalah masyarakat yang menjelang kehancuran,” ucap filosof S, Jack Odell, “konsep dan teori dasar etika memberikan kerangka yang dibutuhkan untuk melaksanakan kode etik atau moral setiap orang.” Odell yakin bahwa “prinsip-prinsip etika adalah prasyarat wajib bagi keberadaan sebuah komunitas sosial. Tanpa prinsip-prinsip etika mustahil manusia bisa hidup harmonis dan tanpa ketakutan, kecemasan, keputusasaan, kekecewaan, pengertian, dan ketidakpastian.”¹

Suatu sistem politik (sistem pemerintahan) biasanya mempunyai sekumpulan nilai serta prosedur terselubung dan terang-terangan dalam ideologinya, yang dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi kesehatan dan pertumbuhan sistem pemerintahan itu. Jika nilai politik yang pokok ini identik dengan sistem politik, nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi etika cara dan tujuan komunikasi dalam sistem tersebut. Asumsinya adalah bahwa komunikasi harus membentuk perwujudan nilai ini dan bahwa teknik dan taktik komunikasi yang menghambat, menumbangkan, atau mengelak dari nilai-nilai politik fundamental ini harus dikecam sebagai tidak etis.

Kehidupan demokratis hanya dapat diwujudkan di negeri ini, bila sistem politik kita benar-benar dapat mengakses partisipasi politik rakyat dalam arti yang sebenarnya, dan bukan dalam arti mobilisasi. Sejauh pemerintah dan masyarakat kita mampu mengoperasikan kegiatan politik ke arah partisipasi mayoritas, sejauh itu pula demokrasi akan menjadi solid. Demikian pula sebaliknya.

Sejalan dengannya, pemerintah dan masyarakat harus secara mandiri atau bersama-sama menumbuhkembangkan kemauan baik politik (*political will*) di lingkungannya. Sebab, kehidupan demokrasi akan mengkrystal jika terdapat partisipasi politik dari mayoritas warga masyarakat serta penyelenggara negara.

¹ Johannesen L. Richard, *Etika Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996).

Di sinilah pentingnya sikap dan perilaku setiap personal penyelenggara negara membangun kehidupan pemerintah dan masyarakat yang bersifat demokratis. Bangunan itu membutuhkan dukungan dinamika sosial politik, yang dicerminkan oleh selera demokrasi pemerintah dan masyarakatnya sendiri.²

Selera demokrasi itu, akan mendorong pemerintah di satu sisi, serta masyarakat di sisi lain, untuk merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing secara optimal. Setiap pihak akan berupaya menghindari bentuk-bentuk intervensi ke pihak lain, sejauh hal itu disadari bertentangan dengan konstitusi negara.

Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah harus mampu mencegah bentuk-bentuk keresahan sosial di setiap bidang dan skala pengabdianannya. Baik bersifat terselubung maupun kentara.

Di sinilah pentingnya kepekaan para penyelenggara negara terhadap berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah, Kepedulian itu secara kontekstual dan proporsional relatif harus sama besarnya.

Sebab, sebagai alat negara pemerintah tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus selalu bersikap atas dasar *positive thinking* dalam memahami serta memenuhi kepentingan masyarakat, kendati tolok ukur kepentingan tersebut bersifat relatif subjektif secara parsial atau segmentatif. Sebab, kepentingan individu atau kelompok masyarakat yang satu, tidak selalu sama, bahkan cenderung bertentangan secara tajam dibandingkan kepentingan warga atau kelompok masyarakat yang lain.

Proses komunikasi politik yang benar-benar demokratis harus mampu dipelopori pemerintah, karena pemerintah itu sendirilah yang layak dianggap sebagai pelopor keterbukaan di negara kita. Keberhasilan pembentukan *public image* salah satu dampak positif komunikasi politik yang didominasi pemerintah di masa

² Novel Ali, *Peradaban Komunikasi politik, Potret Manusia Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999).

sebelumnya, harus segera diperkuat dengan pemberian peluang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk meragukan. Paling tidak untuk mempertanyakan sejauhmana kredibilitas pemerintah kita dapat dibuktikan kebenarannya.

Oleh karenanya, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap aktualisasi berpolitik setiap warga negara, namun pengertian berpolituk setiap warga negara luas sekali, maka pemerintah dan masyarakat perlu memberi bingkai yang tidak melecehkan hak asasi manusia di satu sisi, dan tidak pula bertentangan dengan konstitusi negara.

Etika dalam Kehidupan Berpolitik

Apakah berpolitik itu harus mempunyai etika? Atau, adakah etika dalam berpolitik? Persoalan ini memang kerap dipertanyakan orang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa adakalanya orang yang aktif dalam politik praktis menghalalkan segala cara. Dunia politik penuh dengan intrik-intrik kotor dalam upaya memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kenyataan dunia politik menjadi rebutan kekuasaan. Konflik kepentingan antarpol, golongan, kelompok, dan orang per orang di kalangan elite politik diselesaikan secara wajar dan nalar, tetapi memakai jalan kekerasan. Kendatipun rambu-rambu moral sering disebut-sebut sebagai acuan dalam berpolitik secara manusiawi dan beradab, tetapi hal itu hanya bagian dari retorika politik. Dalam kenyataan, rambu-rambu moral banyak diabaikan seperti halnya rambu-rambu lalu lintas di jalan. Akibatnya, kekacauan yang membawa banyak korban pun merebak diberbagai lokasi, lebih-lebih dikalangan rakyat jelata yang sering tidak tahu apa-apa.

Fenomena kelam di atas memang bisa membuat orang bersikap sinis terhadap segala perbincangan tentang etika politik. Namun, dalam pandangan Sudarminta, sikap sinis dan apriori seperti ini justru sangat berbahaya karena sikap demikian menunjukkan sikap keputusasaan. Seolah-olah apa yang terjadi memang semestinya terjadi dan tidak mungkin berbuat lain. Karena itu, etika yang menyadarkan kita tentang

apa yang seharusnya kita upayakan agar tercipta kesejukan, bukan hanya berhenti pada apa yang seharusnya terjadi.³

Sesungguhnya, etika politik merupakan filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia. Apakah yang menjadi ciri khas dimensi politis manusia? “Dimensi politis manusia” adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, ciri khas pendekatan yang disebut “politisi” adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan dikatakan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Demikian pula suatu tindakan harus disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan. Politisi adalah orang yang profesinya menggeluti persoalan mengenai masyarakat sebagai keseluruhan. Seorang yang bukan politisi pun dikatakan mengambil sikap politik apabila ia dalam sikapnya itu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai sebuah dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya, dan ditentukan kembali oleh tindak.

Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan “dengan hak moral apakah seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang meeka miliki? Betapapun besar kekuasaan seseorang, ia selalu dapat dihadapkan dengan tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Apabila pertanggungjawaban itu tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah.⁴

³ Alex Sobur, *Etika Pers Profesionalisme dengan nurani*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 50.

⁴ Robert C Solomon, *Etika, Suatu Pengantar* (penerjemah R. Andre Karo-karo), (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 87

Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum karena hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri atas norma-norma bertindak dan norma-norma kelakuan yang benar dan salah dalam masyarakat. Dikatakan, hukum hanya bersifat normatif dan tidak efektif, artinya hukum tidak dapat menjamin agar orang selalu taat kepada norma-normanya. Pihak yang secara efektif dapat menentukan perilaku masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, yakni negara (*state*). Penataan efektif masyarakat adalah penataan yang *de facto*, yang dalam kenyataan, menentukan kelakuan masyarakat. Dengan demikian, hukum dan kekuasaan negara merupakan bahan bahasan utama etika politik. Hukum dianggap sebagai lembaga penata masyarakat yang paling efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia. Singkat kata, etika dan politik membahas hukum dan kekuasaan.

Untuk menghindari kesalah fahaman, maka di sini perlu ditekankan, bahwa dengan kegiatan politik dimaksudkan semua keputusan dan kegiatan yang diarahkan kepada usaha untuk mengikat semua warganegara dan tunduk kepada keputusan yang ingin diambil. Dalam hubungan ini maka kegiatan politik diartikan sebagai kegiatan yang berusaha mengikat “semua anggota polis” kepada keputusan yang diambil.

Dalam komunikasi politik, yang dikomunikasikan adalah masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Dengan sendirinya *pressure groups* atau partai akan berusaha untuk menginterpretasikan kepentingan mereka sebagai kepentingan umum pula, maka terserah kepada masyarakat umum untuk menilainya pula demikian atau tidak.

Aristoteles pernah mengemukakan, bahwa antara etika dan politik itu terdapat hubungan yang paralel. Hubungan tersebut tersimpul pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yaitu: terbinanya warga negara yang baik, yang susila, yang setia kepada negara dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan kewajiban

moral dari setiap warga negara, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik, dalam arti makmur, tenteram dan sejahtera.⁵

Belakang ini *discourses* (wacana) tentang etika politik kian meluas. Prof. Baharuddin Lopa (alm) pernah menyatakan perlunya dibuat (Kode) Etik Pemerintahan dan (Kode) Etik Berpolitik. Tujuannya, agar para politisi dan lembaga-lembaga negara memiliki acuan atau patokan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang pantas dilakukan oleh politisi (DPR), oleh Presiden, oleh MA dan oleh lembaga-lembaga lain, katanya kepada wartawan, Rabu 21 Maret 2001 di Jakarta. Ide itu menarik. Etika sebagai patokan perilaku yang tertulis dan baku (standardized) memang lebih tegas dan lebih jelas daripada yang tidak tertulis.

Masalahnya, seperti apa dan bagaimana wujud konkritnya etika politik para politisi dan para pejabat negara itu? Untuk mendefinisikannya memang tidak terlalu sulit. Etika politik seperti dikatakan oleh kalangan ahli-ahli politik Barat adalah *ethical assesment of political behavior* (penilaian etis mengenai perilaku politik). Yang tidak mudah dilakukan, bahkan juga tidak mudah dipahami, adalah penyatuan di antara keduanya. Sebab politik dan etika adalah dua bidang yang sangat berbeda. Para ahli filsafat politik Barat mengibaratkan politik sebagai ular yang cerdik dan berbisa. Sedangkan etika diibaratkan politik sebagai burung merpati yang tulus dan polos. Dapatkah merpati duduk atau berbaring bersama-sama ular? Mungkin bisa, tetapi merpati tidak akan dapat tidur atau duduk tenang. Politik sebagai dunia kekuasaan murni diatur oleh pertimbangan-pertimbangan kebijakan untuk mencapai kekuasaan. Sedangkan etika sebagai dunia perilaku yang murni, steril, diatur oleh kewajiban-kewajiban moral (*moral imperatives*). Politik adalah alat untuk mengejar kekuasaan. Sedangkan etika politik sebagai dunia moralitas menurut Dean Acheson, mantan Menlu AS

⁵ Ibid, hal. 111

zaman Presiden Truman, tatkala menghadapi krisis Kuba, sama sekali tidak relevan untuk mengejar kekuasaan.

Perseteraan atau ketidakompakan yang berlarut-larut seperti yang terjadi di era presiden Abdurrahman Wahid dengan kelompok politisi di DPR/MPR dinilai banyak pengamat disebabkan oleh kelemahan etika politik di kedua pihak. Pada masing-masing pihak ketidakmampuan menyatukan etika dengan politik terjadi dalam semangat interaksi yang sulit antara ular (kekuasaan) dengan merpati (moralitas). Konflik untuk memperebutkan kekuasaan dikalangan elite politik tersebut berjalan dalam semangat berpolitik yang mengalami kerapuhan etika seperti itu. Secara teoritik etika politik bermakna penyatuan etika dan politik, tetapi konflik atau ketidakcocokan di antara keduanya tidak bisa lenyap. Oleh karena itu “komitmen moral” untuk mengakhiri konflik antara kedua pihak dengan modus dialog atau rekonsiliasi tetap sulit diwujudkan, atau paling tidak, akan memakan waktu yang lama dan melelahkan. Itulah sebabnya berbagai upaya pertemuan dialogis, termasuk rembuk nasional di Bali tempo hari, selalu menemui jalan buntu kalau tidak bisa dikatakan gagal total.⁶

Dengan demikian konflik antara elite politik tersebut sulit dihentikan, bahkan bisa meluas. Sebab masing-masing pihak lagi dituntun oleh aturan-aturan main yang mengacu pada imperatif-imperatif moral dan atau etika. Ketidakcocokan persepsi dan penilaian antara satu kubu dengan kubu yang lain mempermudah masing-masing kubu menyepelekan pendapat atau pemikiran lawannya, betapapun logis dan bermanfaatnya pemikiran itu. Maka sekali lagi, Moralitas menjadi tidak relevan dalam perebutan kekuasaan di antara para elite politik tersebut.

Meskipun demikian komitmen moral tidak bisa lepas sama-sekali dari hati nurani seorang elite politik,

⁶ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 56

betapapun dahsyatnya konflik yang dihadapi. Tindakan politik para elite politik sedikit banyak mempunyai implikasi terhadap kemaslahatan orang banyak yang tidak tahu menahu politik. Mereka biasa disebut rakyat kebanyakan yang tujuan hidupnya adalah kedamaian dan kesejahteraan. Komitmen moral dan hati nurani para elite politik yang sedang “berkelahi” memperebutkan kekuasaan akan mempertanyakan, pantaskah rakyat lemah itu dikorbankan demi kepuasan segelintir elite dan pejabat negara? Etika bisa melarang pemimpin politik dan pejabat negara untuk bertindak merugikan pihak yang tidak bersalah. Tetapi, sayangnya, seperti kata F. Thomson (1993) etika juga bisa mendukung tindakan para pemimpin politik untuk mengorbankan pihak yang tidak bersalah demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Agaknya kebijakan politik seperti itu dipengaruhi pepatah Latin, “*Summum ius summa iniuria* (keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi)”. Dalam hal seperti itu semakin sulit untuk menyatukan etika (burung merpati) dengan politik (ular) pada diri pemimpin politik. Namun tetap ada jalan keluar. Yakni solusinya dikembalikan kepada bisikan hati nurani mereka itu. Suara hati nurani tidak bisa bohong mengenai apa yang pantas dilakukan. Jika mereka berpikir, misalnya, bahwa kemaslahatan seluruh bangsa adalah pilihan yang tepat sehingga “etis” mengorbankan pihak-pihak yang tidak ikut di dalam perseteruan para pemimpin politik, maka hal itu merupakan spekulasi politik yang sangat berbahaya. Belum tentu keselamatan seluruh bangsa bisa terwujud, padahal sudah banyak jatuh korban di kalangan masyarakat (sebagian dari rakyat) yang tidak berdosa.

Pada dimensi lain keterlibatan komunikasi dalam setiap konflik di kalangan elite politik tidak mungkin dihindari. Banyak faktor yang bisa menjelaskan hal itu. Media massa adalah saluran komunikasi politik yang sudah melembaga, atau sudah diakui secara universal sebagai sebuah institusi politik.

Pengertian “politik” dalam proses pemakaiannya dewasa ini terasa sudah sangat jauh menyimpang, atau

mungkin sudah jauh lebih luas dari pengertian asalnya (terminologi). Kata-kata yang biasa kita dengarkan dalam percakapan sehari-hari:

- Urusan wakaf itu sampai sekarang belum beres, sebab sudah diperpolitisasi
- Jangan bicara soal kejujuran, yang kita hadapi sekarang adalah soal politik
- Hati-hati berhadapan dengan dia; dia orang berpolitik, janjinya sukar dipegang.
- Dagangan saya jatuh bangkrut; habis, dia politiki saya dalam berdagang.

Konsekuensi dari pendapat-pendapat tersebut ialah timbulnya semacam *prejudice*, sikap sinis, sikap bermuka dua, di samping timbulnya semacam sikap *pretended/kepura-puraan* terhadap bidang politik, ataupun terhadap orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini.

Sekेरanjang kasus lain masih banyak lagi bila dicari. Haruskah pengertian dan kenyataan seperti ini dipelihara atau didiamkan seterusnya? Jawabannya ialah suatu pertanyaan ulang: Apakah masyarakat itu sendiri menghendakinya?

Sebab, selama masyarakat itu sendiri menganggap bahwa hakekat dari kehidupan berpolitik itu memang harus demikian itulah, dengan sendirinya arena dan situasi hidup dari masyarakat itu tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Penipu, pemerkosa tetap akan dapat hidup selama masyarakat ini sendiri masih rela dan sabar menerima penipuan dan pemerkosaan.

Satu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika ialah, bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia.

Prof. Dr. Ahmad Amin dalam bukunya "Etika (Ilmu Akhlak)" menegaskan bahwa untuk menilai baik atau buruk seseorang, harus dilihat apakah sengaja atau tidak. Jelasnya, pokok persoalan dengan sengaja, dan ia menyadarinya ketika melakukan perbuatan itu.

Dengan peninjauan dari sudut agama Prof. Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa tujuan etika bukan hanya mengetengahkan teori, tetapi juga mempengaruhi dan mendorong kehendak kita agar membentuk kehidupan yang suci, menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan, serta memberi faedah kepada semua manusia. Jadi, etika mendorong kehendak agar berbuat baik, tetapi tidak akan berhasil manakala tidak dilandasi kesucian.⁷

Etika berkaitan erat dengan etos seseorang yang harus senantiasa dijaga demi kewibawaannya dan demi reputasinya dalam memimpin. Dengan memiliki etos, seseorang menjadi sumber kepercayaan (*source credibility*), baik dalam jalur vertikal, dari atasan dan bawahan, maupun dalam jalur horizontal, dari rekan-rekan sederajat di dalam dan di luar organisasi.

Aristoteles mengatakan bahwa etos adalah paduan nilai-nilai “*good sense, good moral character and good will*” yang oleh para cendekiawan masa kini ditafsirkan menjadi paduan dari nilai-nilai dari “*good intensions*” (iktikad baik), “*trustworthiness*” (keterpercayaan) dan “*competence or expertness*” (kemampuan atau keahlian).

Etika sebagai suatu pengetahuan, fungsinya juga adalah sebagai alat membantu menyadarkan orang-orang yang dipercayakan memegang salah satu dari tugas pemerintahan, supaya bersedia melandasi kekuasaannya dengan rasa etik. Rasa etik yang dimaksud tidak lain dari Etika Pancasila.

Etika dan Karakter Pribadi

Khalayak mempunyai persepsi positif atau negatif terhadap kualitas pribadi komunikator, memainkan peran yang berpengaruh dalam menentukan apakah khalayak akan menerima informasi, argumen, atau usulan komunikator. Konsep persepsi khalayak tentang sifat pribadi komunikator ini dinamakan *etos* dalam teori retorika Yunani dan Romawi kuno, dan telah dipelajari

⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), h. 57

oleh para peneliti komunikasi kontemporer dengan istilah-istilah kredibilitas sumber, reputasi, dan citra. Dimensi-dimensi etos yang diselidiki oleh para pakar, antara lain, adalah kualitas personal seperti keahlian, kompetensi, pengalaman, pengetahuan, sifat dapat dipercaya, kejujuran, dapat diandalkan, ketulusan, kedinamisan, kewaspadaan, energi, perhatian pada khalayak, kemampuan personal, dan keramah-tamahan.

Kini Pertimbangkan kemungkinan interaksi, tumpang tindih, dan perbedaan antara konsep-konsep etos dan etika dalam komunikasi. Sungguhpun dalam teori retorika Greco-Roman, etos sering diacu sebagai “bukti etis”, *etos dan etika seharusnya tidak dipandang sebagai konsep yang sama*. Tentunya seorang komunikator yang dinilai tidak etis oleh khalayak yang tinggi atas keetisan sering menyumbang pada persepsi positif mereka atas sifat keterpercayaan si komunikator.

Tetapi mungkin terdapat beberapa kasus bahwa komunikator yang sangat etis mempunyai *etos* yang moderat atau rendah karena khalayak merasa si komunikator tidak mengetahui, menjauh, membosankan, atau karena khalayak tidak mempunyai pengetahuan tambahan tentang reputasi komunikator. Juga mungkin terdapat kasus ketika seorang komunikator mempunyai etos yang baik di mata khalayak tertentu, tetap masih dinilai tidak etis oleh para pengamat lain, dalam kesempatan-kesempatan lain, dengan standar-standar yang berbeda.

Sebuah masyarakat tanpa etika adalah masyarakat yang menjelang kehancuran,” ucap filosof S. Jack Odell. Menurut Odell, “konsep dan teori dasar etika memberikan kerangka yang dibutuhkan untuk melaksanakan kode etik atau moral setiap orang.” Odell yakin bahwa ‘prinsip-prinsip etika adalah prasyarat wajib bagi keberadaan bagi komunitas sosial. Tanpa prinsip-prinsip etika mustahil manusia bisa hidup harmonis dan tanpa ketakutan, kecemasan, keputusasaan, kekecewaan, pengertian, dan ketidakpastian.”⁸

⁸ Ibid, h. 134

Suatu sistem etika kemasyarakatan atau pribadi bukanlah obat yang mujarab dan berlaku bagi seluruh persoalan individu maupun kolektif. Apa yang dapat disumbangkan oleh teori etika dan refleksi sistematis tentang etika? Satu jawaban diajukan oleh filosof Carl Wellman:

Sebuah sistem etika tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan praktis, tetapi kita tidak bisa memilih dan bertindak secara rasional tanpa sistem etika yang jelas atau samar-samar. Sebuah teori etika tidak mengatakan pada seseorang apa yang harus dilakukannya pada situasi tertentu, tetapi ia juga tidak diam sama sekali; teori etika mengatakan padanya apa yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan apa yang harus ia dilakukan. Fungsi praktis dari sebuah sistem etika terutama adalah untuk mengarahkan perhatian kita pada pertimbangan yang relevan, alasan-alasan yang menentukan kebenaran atau kekeliruan suatu tindakan.⁹

Komunikasi etis bukan hanya serangkaian keputusan yang cermat dan reflektif, satu demi satu untuk berkomunikasi dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara etis. Penerapan kaidah-kaidah etika secara berhati-hati kadang-kadang tidak mungkin dilakukan. Tekanan yang dihadapi mungkin saja terlalu besar atau batas waktunya mungkin terlalu dekat untuk membuat suatu keputusan sehingga tidak ada waktu yang cukup pertimbangan yang mendalam. Kita mungkin tidak yakin apa kriteria etika yang relevan dan bagaimana menerapkannya. Situasinya mungkin begitu unik sehingga kriteria yang dapat diterapkan tidak segera terlintas dalam benak. Dalam saat-saat krisis atau tidak pasti seperti itu, keputusan kita mengenai komunikasi etis muncul bukan dari pertimbangan yang mendalam, melainkan lebih dari “karakter” yang terbentuk dalam diri kita. Lebih jauh lagi, karakter etis kita mempengaruhi terma-terma yang kita gunakan

⁹ Ibid, h. 139

untuk menggambarkan suatu situasi dan apakah kita percaya bahwa situasi itu mengandung pengertian-pengertian etis.

Pertimbangan sifat karakter moral sebagaimana yang dideskripsikan oleh ahli etika, Richard DeGeorge dan Karen Labacqz. Menurut DeGeorge:

Seiring dengan perkembangan, manusia cenderung mengambil pola tindakan dan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan ini, ketika ditinjau secara kolektif, kadang-kadang disebut karakter. Seseorang yang menurut kebiasaan cenderung bertindak secara moral sebagaimana mestinya berarti memiliki karakter yang baik. Jika ia bertahan dari godaan yang kuat, berarti ia memiliki karakter yang kuat. Jika terbiasa bertindak secara tidak bermoral, ia memiliki karakter yang jelek secara moral. Sakalipun memiliki niat yang baik tetapi sering terjatuh ke dalam godaan, ia memiliki karakter yang jelek. Karena karakter dibentuk oleh tindakan-tindakan sadar, pada umumnya orang bertanggung jawab secara moral atas karakter serta atas tindakan sendiri.¹⁰

Lobacqz yakin, “sesungguhnya, ketika kita bertindak, kita bukan hanya melakukan sesuatu, kita juga membentuk karakter kita sendiri. Pilihan-pilihan atas apa yang akan kita lakukan juga merupakan pilihan tentang akan menjadi apa kita nanti. Suatu kebohongan tidak selalu membuat kita menjadi seorang penipu; tetapi serangkaian kebohongan bisa jadi membuat kita begitu. Jadi, setiap pilihan tentang apa yang akan dilakukan juga merupakan sebuah pilihan tentang akan menjadi apa kita nanti.

Dalam budaya Yahudi-Kristen atau Barat, karakter moral yang baik biasanya dikaitkan dengan perwujudan kebiasaan-kebiasaan baik, seperti berani, sederhana, bijaksana, adil, ramah, terbuka, lemah lembut, sabar, jujur, dan dapat dipercaya. Budaya lain mungkin menjunjung tinggi kebaikan lain yang menurut

¹⁰ Op cit, h. 143

mereka merupakan karakter etis yang baik. Dalam diri kita melekat kecenderungan untuk bertindak, kebaikan ini membimbing etika perilaku komunikasi kita ketika pertimbangan yang hati-hati atau jernih tidak mungkin dilakukan.

Perspektif Politik

Suatu sistem politik biasanya mempunyai sekumpulan nilai serta prosedur terselubung dan terang-terangan dalam ideologinya, yang dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi kesehatan dan pertumbuhan sistem pemerintahan itu. Jika nilai politis yang pokok ini identik dengan sistem politik, nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi etika cara dan tujuan komunikasi dalam sistem tersebut. Asumsinya adalah bahwa komunikasi harus membentuk perwujudan nilai ini dan bahwa teknik dan taktik komunikasi yang menghambat, menumbangkan, atau mengelak dari nilai-nilai politik fundamental ini harus dikecam sebagai tidak etis.

Sebagaimana digunakan di sini, ruang lingkup nama “perspektif Politik” merentang jauh dari sekedar komunikasi para presiden, politikus, kampanye, politik, atau partai politik tertentu. Setiap komunikasi tentang isu-isu publik atau kebijakan publik yang didefinisikan secara gamblang, baik militer, ekonomi, sosial, maupun politik; baik nasional, kenegaraan, maupun lokal, dapat dinilai oleh satu atau lebih perspektif politis berikut. Biasanya setiap sistem yang berbeda dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang berbeda yang mengarah pada penilaian etika yang berbeda.¹¹

Dalam mengemukakan “Sebuah Basis Etis bagi Komunikasi”, Karl Wallace mengembangkan sebuah perspektif politik. Ia mengemukakan empat nilai yang dipandangnya mendasar bagi keberlangsungan sistem politik Amerika: penghormatan atau keyakinan akan wibawa dan harga diri individual; keterbukaan atau

¹¹ Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara* (penerjemah Benyamin Molan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 79

keyakinan pada pemerataan kesempatan; kebebasan yang disertai tanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan; dan keyakinan pada kemampuan setiap orang untuk memahami hakekat demokrasi. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai ini, warga negara harus mendukung kebebasan berbicara, pers dan dewan harus mendukung penyebaran informasi umum yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan harus menjamin keterbukaan dan keberagaman saluran-saluran komunikasi publik. Wallace memberi garis besar dari empat “moralitas’ atau garis-garis pedoman etika yang berakar dalam nilai-nilai demokratis ini.

Pertama, kita harus mengembangkan kebebasan meneliti (*habit of search*) yang tumbuh dari pengalaman bahwa selama kita berkomunikasi, kita adalah sumber primer, kalau bukan satu-satunya argumen dan informasi tentang subjek yang dibicarakan. Pesan kita harus mencerminkan pengetahuan yang menyeluruh tentang subjek itu, kepekaan pada isu yang relevan dan implikasi-implikasinya, kesadaran tentang pendapat serta fakta penting dan dapat dipercaya, serta kesadaran bahwa sebagian isu publik bersifat kompleks dan bukan satu sisi. Sebagai tes individual tentang garis-garis pedoman etika ini kita bisa bertanya pada diri sendiri: Bisakah saya menjawab dengan jujur, tanpa menyembunyikan kebenaran, pertanyaan relevan yang mungkin ditanyakan seorang pendengar atau pembaca?

Kedua, kita harus menumbuhkan kebiasaan bersikap adil (*Habit of justice*) dengan memilih dan menampilkan fakta dan pendapat secara terbuka. Komunikator, menurut Wallace, tidak boleh menyelewengkan atau menyembunyikan data yang mungkin dibutuhkan khalayak untuk mengevaluasi argumen komunikator yang adil. Komunikator harus menghindari penggantian bahasa yang dipenuhi dengan muatan emosi dan kesalahan karena asosiasi demi argumen yang tepat. Sebagai ujian pribadi, kita dapat bertanya: Dalam memilih dan menampilkan bahan-bahan saya, Apakah saya memberi khalayak saya kesempatan untuk membuat penilaian yang adil?

Ketiga, Komunikator harus terbiasa mengutamakan motivasi yang umum daripada motivasi pribadi. Komunikator publik yang bertanggung jawab harus secara merata mengungkapkan sumber-sumber informasi dan pendapatnya. Kita harus membantu khalayak kita untuk menimbang bias-bias, prasangka, dan motivasi yang berpusat pada diri yang terkandung dalam bahan sumber. Kita dapat bertanya: Apakah saya telah menyembunyikan informasi tentang sumber saya maupun motif-motif saya sendiri yang jika diungkapkan, akan merusak kasus saya?

Akhirnya, Wallace mengajak kita menanamkan *kebiasaan menghormati perbedaan pendapat* dengan memperlihatkan dan mendorong berbagai ragam argumen dan pendapat. Seorang komunikator akan mencari kerja sama dan kompromi kalau diperlukan dan dibenarkan oleh hati nurani. Namun, Wallace merasa bahwa kita tidak perlu “mengorbankan prinsip demi kompromi” dan kita harus “lebih suka menghadapi konflik daripada menerima penentraman”. Dia mengajukan pertanyaan: Bisakah saya dengan bebas mengakui kekuatan bukti dan argumen yang bertentangan dan masih mengajukan sebuah pendapat yang menampilkan saya?

Untuk membantu analisis kita tentang pedoman etika Wallace, ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan. Di manakah kemungkinan muncul ambiguitas dalam aplikasi standar ini? Sejauhmana keempat standar etika ini secara aktual dilakukan oleh para komunikator kontemporer, seperti dalam kampanye politik, periklanan dan hubungan masyarakat? Pedoman Wallace tampaknya dirancang terutama untuk mencermati komunikasi publik, seperti pidato umum, editorial surat kabar, atau periklanan politik. Sejauhmana “moralitas” ini cocok untuk penilaian etika terhadap komunikasi pribadi, antarpersona, seperti wawancara, penyelesaian masalah, diskusi kelompok kecil, obrolan di tempat kos, atau surat antarteman? Sebuah sumber yang bagus untuk merangsang pemikiran tentang pertanyaan ini adalah pengujian yang dilakukan Ernest Bormann tentang implikasi etis diskusi

kelompok kecil dalam *Discussion an Group Methods*. Bormann banyak menyandarkan diri pada wawasan dan perspektif Wallace.¹²

Wallace juga menekankan perhatian pada sarana dan tujuan. Dia memperhatikan bahwa kita telah meletakkan keberhasilan pencapaian tujuan lebih tinggi daripada sarana yang digunakan untuk mencapainya. Yang lebih ditakutkannya adalah bahwa ketidakpedulian komunikator terhadap penggunaan teknik dan imbauan yang etis mungkin bisa meruntuhkan kepercayaan diri, dengan menumbuhkan rasa tidak percaya dan kecurigaan pendengar. Sejauhmana kita harus percaya bahwa pemeliharaan kepercayaan publik akan kejujuran komunikasi penting bagi kita?

Franklyn Haiman menawarkan satu versi “derajat rasionalitas” perspektif politik untuk menilai etika komunikasi. Nilai demokratis fundamental yang menjadi landasan pendekatannya adalah peningkatan kapasitas manusia untuk bernalar secara logis. Ia percaya, syarat utama untuk dapat memfungsikan sistem politik yang memadai adalah peningkatan kapasitas rasional manusia. Standar etika yang diajukan Haiman adalah tingkat rasionalitas, tingkat pilihan bebas secara sadar, yang tercermin dan didukung oleh teknik atau seruan komunikasi tertentu.

Yang dipandang tidak etis menurut Haiman (khususnya dalam kampanye politik, komunikasi pemerintah, dan periklanan) adalah teknik-teknik yang mempengaruhi penerima “dengan menghilangkan proses pikiran sadarnya dan menanamkan sugesti atau melakukan penekanan pada pinggiran kesadarannya untuk menghasilkan perilaku otomatis yang tidak reflektif.” Haiman memandang upaya untuk mengalihkan “pikiran dan rasio manusia agar menjadi tidak reflektif, semi-sadar, atau tidak sadar” sebagai pendekatan komunikatif yang tidak etis. Contoh-contoh apa dari politik dan periklanan kontemporer yang mungkin dapat membatalkan pengujian yang diajukan Haiman atas komunikasi yang tidak etis?

¹² Ibid, hal. 232

Bersama beberapa pengkritik, Haiman mencurigai etika seruan motivasional dan emosional sebagai suatu teknik persuasif. Tetapi tidak seperti sebagian tokoh lainnya, ia dengan hati-hati berupaya mendiskripsikan syarat-syarat agar seruan seperti itu dipandang etis. Sebagai pedoman, Haiman mengatakan bahwa “tidak ada lagi cara efektif dalam jangka panjang” untuk memotivasi seseorang, kecuali membantunya secara sadar dengan memusatkan perhatian pada emosi, kebutuhan, nilai, dan kehendak yang relevan dengan isu yang dihadapi dan “memperlihatkan padanya, dengan jelas dan rasional, bagaimana ia memenuhinya dengan baik”. Tetapi sebagai prinsip dasar, ia menekankan “bahwa selama seorang pembujuk berusaha memperoleh penerimaan tidak kritis terhadap pandangannya, berarti ia telah melanggar demokrasi yang ideal”.

Kita dapat mempertimbangkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan sebuah perspektif politik seperti perspektif Haiman. Haruskah kita meyakini bahwa seruan-seruan emosional dengan sendirinya tidak etis atau harus dinilai dalam konteks bagaimana dan mengapa cara tersebut digunakan? Apakah semua seruan emosional menghambat proses penalaran logis manusia? Semudah apakah menyebut sebuah seruan sebagai logis atau emosional? Bagaimanakah imbauan logis dan emosional terjalin dalam sebuah argumen?

Dalam dua tulisan sekitar satu dasawarsa setelah formulasinya yang pertama, Haiman mengubah derajat rasionalitas perspektif politik dengan memasukkan pembenaran situasional khusus untuk penggunaan etis dari berbagai teknik retorika protes dan konfrontasi.

Versi derajat rasionalitas perspektif politik lainnya berasal dari Arthur Kruger. Bahwa “manusia dapat berpikir tentang dirinya sendiri dan mengatur diri sendiri secara cerdas” merupakan nilai-nilai demokratis dasar yang diasumsikan oleh Kruger. Dari asumsi ini ia menurunkan sebuah standar yang ketat untuk menilai etika persuasi: “Sebuah kesimpulan harus dinilai berdasarkan bukti yang relevan dan memadai... orang yang percaya secara rasional mengimbangi penerimaannya atas sebuah kesimpulan sesuai dengan

jenis bukti yang ditawarkan untuk mendukungnya. Jika tidak ada bukti atau jika buktinya bertentangan, ia menyanggah penilaian tersebut.” Setiap teknik persuasi yang “diterima begitu saja atau merendahkan rasio” adalah tidak etis.

Kruger agak keras dalam menilai etika persuasi yang bersandar pada “patos” atau seruan berdasarkan emosi, motif, dorongan, dan kehendak, serta seruan yang muncul dari etos pelaku citra kredibilitas di mata khalayak. Ia menunjukkan peran emosi yang didefinisikan dengan cermat. Seorang komunikator dikatakan etis ketika memperlihatkan (melalui bukti dan penalaran yang tepat) kaitan antara usulan yang masuk akal dan pemenuhan motif serta nilai yang relevan melalui usulan itu. Tetapi posisi etika sentralnya sangat keras: “Persuasi dengan atos atau patos mengeliminasi, mengaburkan, mendistorsi, atau benar-benar merusak penalaran dan dengan demikian wataknya benar-benar tidak selaras dengan rasionalitas.”

Patos (seruan emosional) digambarkan Kruger sebagai “sebentuk sugesti yang bermain pada kehendak tersembunyi, frustrasi, rasa bermusuhan, dan prasangka” serta sebagai sebuah imbauan “terhadap hasrat-hasrat dasar, terhadap objek yang dicintai atau dibenci, terhadap prasangka”. Sebagai suatu definisi, secara psikologis, apakah diskripsi ini memadai? Bagaimanakah kira-kira seorang psikolog sosial kontemporer mendefinisikan emosi? Pikirkan seberapa jauhkah kita harus menerima atau menolak pernyataan Kruger: “Manusia harus diajar untuk berefleksi, menganalisis, dan mengevaluasi, dan untuk tujuan ini ia harus belajar menguji dan mengontrol emosinya.” Dengan merujuk pada periklanan, misalnya, Samuel Smith mengutarakan bahwa “fungsi utama iklan bukanlah mendidik atau mengembangkan daya nalar”.

Perspektif Komunikasi Islami

Keberadaan era dunia maya (*cyberspace*) telah membawa perubahan luar biasa dalam tatanan komunikasi umat manusia (*human communication*). Banyak aspek komunikasi telah berubah. Unsur-unsur

lama telah banyak bergeser. Juga teori jurnalisme, sistem-sistem media dan atau teori media yang ada di dunia ini telah terimbas oleh keberadaan dunia maya. Pergeseran konseptual juga menimpa aspek etika, aspek kebebasan, aspek hukum dan aspek bisnis media sebagai akibat keberadaan era dunia maya. Sudah tentu ada pula imbasnya pada sistem komunikasi religius termasuk komunikasi islami (Islam).

Mengenai perspektif komunikasi islami (Islam) hampir tidak ada buku ilmu komunikasi atau ilmu sosial membahasnya. Kalaupun ada hanya disinggung sepintas dan hanya satu atau dua aspeknya saja. Padahal jumlah penganutnya sangat besar, berkisar satu miliar orang di seluruh dunia. Juga jumlah negara Islam atau yang penduduknya mayoritas Islam cukup banyak.¹³

Seperti apa dan bagaimana hakekat komunikasi Islam (islami) itu? Bagaimana interaksinya dengan dunia maya? Perspektif komunikasi islami adalah bagian perspektif komunikasi manusia (*human communication*) pada umumnya.

Perbedaan yang sangat mendasar antara komunikasi Islam dengan komunikasi islami. Komunikasi Islam adalah sistem komunikasi umat Islam. Pengertian yang sederhana itu menunjukkan, bahwa komunikasi Islam lebih fokus pada sistemnya dengan latar belakang filosofi (teori) teori yang berbeda dengan perspektif komunikasi non-Islam. Dengan kata lain sistem komunikasi Islam didasarkan pada Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sudah tentu filosofi atau teori yang menjadi landasan sistem komunikasi Islam mempunyai implikasi-implikasi tertentu terhadap makna proses komunikasi, model komunikasi, media massa, jurnalistik, etika, hukum dan kebijakan media (*media law and media policy*).

Sementara komunikasi islami secara singkat dapat didefinisikan bahwa komunikasi islami adalah proses penyampaian pesan antara manusia yang didasarkan pada ajaran Islam. Pengertian itu

¹³ A. Muis, *Komunikasi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 65

menunjukkan, bahwa komunikasi islami adalah cara berkomunikasi yang bersifat islami (tidak bertentangan dengan ajaran Islam). Dengan demikian pada akhirnya terjadi juga konvergensi (pertemuan) antara pengertian komunikasi Islam dengan komunikasi islami. Boleh dikatakan, komunikasi islami adalah implementasi (cara melaksanakan) komunikasi Islam.

Komunikasi islami (Islam) tergolong dalam kelompok teori komunikasi teokrasi seperti halnya komunikasi religius lainnya, maka perlu diperhatikan, aspek-aspek mana sajakah yang dimiliki jenis komunikasi tersebut yang berbeda dengan komunikasi manusia (*human communication*) pada umumnya. Secara umum semua bentuk komunikasi manusia memiliki ciri-ciri yang sama atau serupa. Misalnya proses, model, dan pengaruh pesannya. Ihwal yang membedakan komunikasi Islam (islami) dengan teori komunikasi umum adalah terutama latar belakang filosofinya (Al-Qura'an dan Hadits Rasulullah) dan aspek etikanya yang didasarkan pada landasan filosofi tersebut. Etika komunikasi islami (Islam) secara umum kurang lebih sama juga dengan etika komunikasi umum. Isi perintah dan larangan sama atau serupa antara keduanya. Ihwal yang membedakan keduanya adalah sanksi dan pahalanya.

Komunikasi umum (non-Islam, nonreligius) memang mementingkan pula etika, tetapi sanksi atas pelanggaran komunikator terhadap etika komunikasi hanya berlaku di dunia. Sedangkan sanksi atas pelanggaran terhadap etika komunikasi Islam berlaku sampai di akhirat. Ada hukuman akhirat dan hukuman di alam kubur atau di alam barzah. Para pelanggar diancam sanksi yang pedih di akhirat (di neraka). Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal itu baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja sanksi itu tidak berlaku lagi jika si pembuat telah diampuni oleh Tuhan.

Di samping hukuman tentu ada pula ganjaran atau pahala yang disediakan bagi komunikator Islam yang mentaati etika komunikasi agamanya.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa semua bentuk komunikasi Islam (islami) tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan komunikasi non-Islam dalam hal model, proses dan efeknya. Yang memadakannya lebih pada landasan filosofinya. Landasan teori atau filosofinya tentulah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Dengan sendirinya komunikasi Islam (islami) terikat pada pesan khusus, yakni dakwah karena Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seisi alam dan juga merupakan (memuat) peringatan, *warning* dan *reward* bagi manusia yang beriman dan berbuat baik (Surat Al-Ashr).

Jika diambil model komunikasi yang paling elementer dari Aristoteles (384-322 SM) yang disebut *rhetorica* atau seni berbicara untuk mempengaruhi pendengar, maka kelihatan ada tiga komponen dalam proses komunikasi, yakni pembicara (*rhetor*), pesan dan komunikan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit tentu saja terdapat pula saluran, efek dan arus balik (*feedback*). Saluran adalah jalan (*path*) yang menyalurkan atau yang dilalui oleh pesan sehingga pesan itu bisa mencapai komunikan. Jadi saluran adalah jalan (*path*) yang menghubungkan antara komunikator dan komunikan. Saluran itu bermacam-macam. Mulai dari ruangan (udara) sampai kepada (gerakan) anggota-anggota badan, tangan, lengan, telunjuk, sorot mata, gerakan kening, alat tulis yang dipegang si pembicara, dan sebagainya. Dengan demikian saluran pesan bisa juga berfungsi sebagai isyarat komunikasi atau merupakan pesan itu sendiri (nonverbal dan meta komunikasi). Juga semua gerakan tubuh dan sebagainya tersebut dapat merupakan arus balik (*feedback*) dari penerima pesan. Perlu diketahui, bahwa *feedback* dalam *rhetorica* (retorika) sifatnya "mendukung" maksud komunikator karena komunikasi retorika adalah model arus pesan satu arah.¹⁴

¹⁴ Ibid, hal. 70

MODEL RHETORICA (Aristoteles, 384-322 SM)



A = Komunikator/Rhetor/Pembicara

P = Pesan (message) = *massaticum* (Latin) = “ *kirim*”

B = Komunikan/Penerima pesan

Seperti itulah model komunikasi teokrasi atau model komunikasi islami (Islam) yang pesannya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah. Tentulah pesan itu bersifat imperatif atau wajib hukumnya untuk dilaksanakan karena merupakan pesan kebenaran berdasarkan firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah. Pesan tidak boleh merupakan sensasi, kebohongan, kefasikan, pelintiran kata-kata dan kebohongan publik (*public lies*). Komunikator dalam perspektif Islam (dan agama-agama Samawi lainnya) pada hakekatnya adalah saluran pesan dalam arti orang yang menyampaikan firman-firman Alloh SWT dan Hadits Nabi kepada semesta alam di samping menurut pengertian teori komunikasi yang diutarakan di atas. Dengan demikian proses komunikasi islami yang bukan komunikasi dakwah lisan/tulisan harus terikat pada norma-norma etika agama (Islam).

Jika perspektif komunikasi Islam (islami) harus dikaitkan dengan ajaran agama Islam (Al-Qur’an dan Hadits), maka salah satu sifat khas komunikasi Islam (islami) tentulah faktor etika (*akhlakul karimah*). Berarti teori (perspektif) komunikasi Islam (islami) memang memiliki perbedaan dengan yang non-Islam. Tetapi perbedaan itu lebih pada isi pesan (*content*) komunikasi yang harus terikat pada perintah agama. Dengan sendirinya pula unsur *content* mengikat unsur komunikator. Artinya, komunikator harus menjunjung tinggi etika. Ia harus memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dalam menyampaikan pesan-berbicara, berpidato, berkhotbah, berceramah, menyiarkan berita, menulis berita, menulis artikel, mewawancara, mengkritik, melukis, menyanyi, bermain film, bermain sandiwara di

panggung pertunjukan, menari, berolah raga dan sebagainya dimuka umum.

Komunikator tidak boleh menggunakan simbol-simbol atau kata-kata yang kasar, yang menyinggung perasaan komunikan atau khalayak. Juga komunikator tidak boleh memperlihatkan gerak-gerik, perilaku, cara pakaian yang menyalahi kaidah-kaidah agama. Misalnya perempuan-perempuan yang berolah raga di muka umum atau ditayangkan oleh TV, biasanya lebih menyajikan tontonan “keterbukaan” bagian-bagian tubuh dengan pakaian yang sangat minim dilarang oleh agama Islam.

Memang menjadi masalah bagi komunikasi Islam (islami). Sebab saluran penyampaian pesan dengan teknologinya yang super canggih seperti itu boleh dikatakan “bebas rambu-rambu hukum dan etika”, terlalu sulit bahkan sering tidak terkontrol oleh rambu-rambu yang tersedia (*control proof*). Komunikasi dunia maya bebas melintasi batas-batas negara tanpa rintangan yang berarti. Dengan demikian segala macam informasi termasuk pornografi dan kejadian-kejadian luar biasa, kejadian-kejadian yang aneh atau *oddity* menurut istilah jurnalistik sangat mudah masuk diberbagai negara karena kebanyakan negara sudah memiliki komputer dan internet. Lalu lintas informasi melalui banyak situs (*websites*) sangat ramai dan karena itu para komunikator internet sangat mudah melakukan penyamaran identitas. Di kota-kota besar di Indonesia sudah banyak warung internet (Warnet). Banyak orang terutama kalangan remaja mudah mengakses informasi ke berbagai situs atau media on line baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Kultur Komunikasi dalam Etika Politik

Media massa sudah tentu berhubungan pula dengan keterkaitannya pada etika dan politik (yang “kurang akrab”). Hal itu menjadi penting artinya untuk disimak, seberapa besar kemungkinn komunikasi “mengakrabkan” kedua dunia yang berbeda itu (etika dan politik) dalam format pemberitaan politik? Dalam kasus-kasus politik tertentu, misalnya kasus Kalimantan

Tengah dan kasus-kasus “kebijakan Politik” yang menimpa beberapa menteri baru-baru ini muncul masalah etika pemberitaan. (Mantan) Wapres Megawati, misalnya, menghimbau pers agar tidak membesar-besarkan (*blow-up*) kasus Kalteng. Sedangkan Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla ternyata telah “*diblow up*” oleh sebagian media massa sehingga kedua mantan menteri itu merasa sangat kecewa. Jelas kelihatan, kejadian-kejadian tersebut sangat berimplikasi etika komunikasi. Artinya, sebagian media tidak sanggup pula “menyatukan” etika komunikasi dengan politik. Hampir sama dengan kesulitan yang dialami para elite politik dan para pejabat negara dalam upaya menyatukan etika (merpati) dengan tindakan politik (ular).¹⁵

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (almarhum) pernah menyatakan keinginannya agar para elite politik menggunakan (bahasa) komunikasi politik yang santun. Seperti apa komunikasi politik yang santun itu, tidak dielaborasi oleh presiden. Tetapi dapat dibuat tafsiran bahwa maknanya tidak jauh dari makna bersikap sopan dalam membuat kenyataan atau isu-isu yang berimplikasi politik (*fatsoenlijk politieke gedrag*). Seterusnya pengertian tersebut, tidak dapat tidak, berimplikasi etika (komunikasi) politik.

Masalahnya, sejauhmana etika komunikasi dapat berperan untuk menjadi rambu bagi politik? Masalah itu bisa muncul karena etika dan politik adalah dua dunia yang berbeda dan karena itu tidak mudah menyatukan keduanya. Politik seperti dinyatakan oleh Dennis F. Thompson (1978) berada pada dunia kekuasaan. Sedangkan etika berada pada dunia moralitas. Politik sebagai alat mengejar kekuasaan sering perlu menggunakan komunikasi yang “keras” untuk mempengaruhi opini atau sikap masyarakat. “Keras” tidak selalu berarti kekerasan fisik. Bisa juga berupa ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang bersifat agitatif. Hal itu misalnya muncul dalam pernyataan-pernyataan beberapa orang elite politik di DPR dan elite

¹⁵ Op cit, hal. 85

parpol belakangan ini. Dengan demikian etika komunikasi politik sangat sulit, bahkan tidak relevan, untuk mengajar kekuasaan. Hal seperti itulah yang terjadi pada berbagai unjuk rasa yang massif belakangan ini. Misalnya di Jawa Timur. Dari aksi-aksi unjuk rasa yang seakan-akan memulikan kekerasan fisik itu muncul pertanyaan yang sulit dijawab secara hitam putih. Yaitu bagaimana cara melaksanakan etika komunikasi politik tatkala terjadi pendangkalan komitmen terhadap rambu-rambu etika dan hukum yang mestinya dipatuhi dalam mewujudkan kemerdekaan berbeda pendapat? Komitmen moral dan etika ratusan ribu pengunjuk rasa itu bisa menipis karena pengaruh psikologi massa (kesadaran “aku” seketika lenyap di dalam kesadaran “kita”). Mau tidak mau perilaku destruktif mudah muncul dan sulit dikontrol oleh etika. Barulah etika bisa berperan jika ada kekuatan lain yang melakukan intervensi. Di dalam hal seperti itulah eksistensi alat kekuasaan negara merupakan sebuah alasan pembenar.

Jadi, bagaimana sebaiknya penerapan politik itu dalam kehidupan bernegara? Sudah menjadi pengertian umum, bahwa sampai sekarang masih saja ada:

- Penggede yang koruptor, yang belum (sengaja) tidak dihadapkan ke meja hijau, dengan alasan demi untuk menjaga kestabilan politik, atau dengan dalil yang lebih halus, yang sama maksudnya.
- Masih juga ada kedudukan-kedudukan penting di tangan orang-orang yang tidak berkeahlian dalam bidang yang didudukinya, justru dengan politik.

Sekهرانjang kasus lainnya masih banyak lagi bila dicari. Haruskah pengertian dan kenyataan seperti ini dipelihara atau didiamkan seterusnya? Jawabnya ialah suatu pertanyaan ulang: Apakah masyarakat itu sendiri menghendaknya? Sebab, selama masyarakat itu sendiri menganggap bahwa hakekat dari kehidupan politik itu memang harus demikian itulah, dengan sendirinya arena dan situasi hidup dari masyarakat itu tidak akan mengalami perubahan-perubahan apa-apa. Penipu, pemerkosa tetap akan dapat hidup selama masyarakat

itu sendiri masih rela sabar menerima penipuan dan pemerkosaan.

Satu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika ialah, bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia.

Etika sebagai suatu pengetahuan, fungsinya juga adalah sebagai alat membantu menyadarkan orang-orang yang dipercayakan memegang salah satu dari tugas pemerintahan, supaya bersedia melandasi kekuasaannya dengan rasa etik. Rasa etik yang dimaksud tidak lain dari Etika Pancasila. Etika yang dijiwai oleh falsafah negara Pancasila, disebut Etika Pancasila, yang meliputi:

- **Etika yang berjiwa Ketuhanan Yang Maha Esa:**
Orang yang ber-etik seperti ini, pada prinsipnya adalah mereka yang percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Apa artinya ini? Yaitu mereka yang percaya dan patuh pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Kedengarannya sangat mudah, yang berat memang prakteknya, dalam menerapkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari.
- **Etika yang berperikemanusiaan**
Yaitu etika yang menilai harkat kemanusiaan tetap lebih tinggi dari nilai kebendaan. Dalam prakteknya, etika kemanusiaan ini tidaklah dapat membenarkan adanya rasialisme, sikap membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulitnya (seperti yang berlaku pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat).
- **Etika yang dijiwai oleh rasa Kesatuan Nasional**
Rasa Kesatuan Nasional (kebangsaan) di sini memperlihatkan ciri khusus dari sifat bangsa Indonesia yang Bhinneka tunggal Ika. Sebagai bangsa yang satu dengan sendirinya juga cinta pada persatuan bangsa. Jadi menurut etika ini, mereka yang berifat separatis, suka memecah

belah/povinsialisme, sukuisme, adalah orang-orang yang bersifat jahat.

- **Etika yang berjiwa Demokrasi**

Demokrasi adalah lambang persaudaraan manusia; jadi etika demokrasi adalah etika yang berjiwa persaudaraan, yang menilai manusia sebagai manusia, yang sama-sama berhak akan kemerdekaan, kebebasan dan fasilitas-fasilitas kemanusiaan lainnya. Dengan sendirinya etika demokrasi ini bertentangan dengan sikap-sikap yang otoriter, yang menyukai kekerasan dan kekejaman

- **Etika yang berjiwa Keadilan Sosial**

Keadilan sosial adalah manifestasi dari kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kemanusiaan, jiwa yang cinta kepada persatuan, jiwa yang bersifat demokratis, sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dinamika dari keadilan sosial ialah semangat mau bekerja. Dengan kata lain etika dalam bentuk ini memberikan penilaian baik hanya kepada mereka yang mau dan giat bekerja. Kemakmuran tidak dengan sendirinya jatuh dari langit, tetapi harus diperjuangkan. Sebab itu mereka menganggur, menjadi pengemis (sedangkan kondisi tubuhnya memungkinkan ia dapat bekerja), adalah merupakan musuh-musuh dari keadilan sosial. Banyak di antara mereka yang menderita sial dan ketiadaan keadilan, adalah karena kemalangan diri sendiri; di samping karena adanya faktor-faktor lain seperti:

- Faktor kelebihan penduduk dan ketiadaan lapangan kerja;
- Faktor kelemahan manajemen kependudukan, dan sebagainya.

Penutup

Sebuah sistem etika tidak memecahkan semua masalah praktis, tetapi kita tidak bisa memilih dan bertindak secara rasional tanpa sistem yang jelas. Sebuah teori etika tidak memberitahu seseorang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, tetapi ia

juga tidak diam sama sekali; teori etika memberitahukan apa yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Fungsi praktis dari sistem etika terutama adalah untuk mengarahkan perhatian kita pada pertimbangan yang relevan, alasan yang menentukan kebenaran atau kesalahan tindakan.

Daftar Pustaka

- Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991.
- A. Muis, *Komunikasi Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- A. Supratiknya, *Komunikasi Antarpribadi; Tinjauan Psikologis*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Ahmad Haris Zubair, *Kuliah Etika*. Rajawali Pers. 1990.
- Dennis F. Thomson, *Etika Politik Pejabat Negara* (penerjemah Benyamin Molan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum. Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988.
- J.Sudarminta, *Etika dalam Ilmu Pengetahuan. Perlunya Suatu Dialog,* dalam Susanto, Budi, dkk. (ed). *Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis, Panorama Praksis Etika Indonesia Modern*, Kanisius dan Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1992.
- , *Etika Profesi bagi Dosen dalam* Moedjanto, Rahmanto, Sudarminta (ed), *Tantangan Kemanusiaan Universal*, Gramedia Multi Utama, Jakarta, 1993.
- Novel Ali, *Peradaban Komunikasi politik, Potret Manusia Indonesia*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. 1999.
- Onong Uchjana Effendy, , *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Richard L. Johannesen, , *Etika Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Robert C. Solomon, *Etika, Suatu Pengantar* (penerjemah R. Andre Karo-karo), Erlangga, Jakarta, 1987.
- Salam Burhanuddin, *Etika Sosial; Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Stewart L. Tubbs, dan Sylvia Moss, . *Human Communication, Prinsip-prinsip Dasar*, Buku Pertama (penerjemah Deddy Mulyana dan Gembirasari), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.

